**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU NOMOR : 366/PID. B/2020/PN. PBR**

Oleh: Agung Pranata

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, S.H.,Msc.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat : JL.Tengkubey, Perumahan Maya Sejahtera Pekanbaru.

Email / Telepon : agungpraanata@gmail.com / 0812-7033-8070

ABSTRACT

Crime in the cyber world is an obstacle to the development of community well-being. This makes the rules in Article 303 of the Criminal Code unable to deal with online gambling crime, so a more specific rule is enacted, namely Act Number 11 of 2008 as amended to Act Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, abbreviated as UU ITE. The accused is deemed to have violated Article 303 bis paragraph 1 of the Criminal Code and is subject to imprisonment for 6 months by the court of Pekanbaru.

The purpose of this study is to determine the application of the law on the crime of gambling in the Decree Number: 366/PID. B/2020/PN. PBR and To find out the judge's considerations in making a decision on the crime of online gambling in the decision Number: 366/PID. B/2020/PN. HBWs. The type of research in this study is normative research conducted by literature search or secondary data.

The conclusion of this investigation is that the judge's consideration in deciding this case concluded that the perpetrators of online gambling crimes in Indonesia were punished very lightly, based on the decisions analyzed, with the punishment given to the perpetrators of online gambling crimes. gambling offenses was very light, only 6 months in prison. From this it can be concluded that the role of law enforcement in the implementation of existing regulations in this case of gambling needs to be clarified again, because with a very low threat it is assumed that it will be difficult to reduce or eliminate the crime of gambling.

Keywords: Crime - Gambling - Online

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan.¹ Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.²

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.³ Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi destruktif telah

menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.⁴ Peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat. Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian.⁵ Perjudian merupakan salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era zaman sekarang perjudian semakin berkembang pesat. Disadari atas produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti pada penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone (handphone).⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

¹Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010, hlm.126.

²Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018, hlm.80.

³Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

⁴Didik J Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 2.

⁵Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Independent*, Vol.5 No.1 2018, hlm.;23.

⁶Christianata, *Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Palangka Raya, *Jurnal Teknologi Informasi*, 2018, hlm.69.

terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu Pasal berdasar pada kaitannya.⁷ Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.⁸

Selanjutnya Patterson berpendapat bahwa penafsiran hukum timbul apabila terjadi konflik dalam berbagai argumentasi hukum atas permasalahan hukum tertentu dan penafsiran berperan untuk menyelesaikan tegangan (*tention*) di antara perbedaan argument tersebut. Pendapat serupa diungkapkan oleh Mathiaas Klaat bahwa penafsiran dimulai dengan suatu pertanyaan yang berakhir dengan pilihan antara berbagai kemungkinan konstruksi dimana pilihan tersebut dibuat dengan argument sehingga terdapat hubungan yang erat antara penafsiran dan argumentasi.⁹

Teori ini fokus pada penafsiran hukum jenis penafsiran sistematis, yang

mempelajari sistem dan rumusan undang-undang yang meliputi:

- 1) Penalaran analogi dan penalaran *a kontario*. Penggunaan *a kontario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh Pasal Undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah Undang-undang.
- 2) Penafsiran ekstensif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah terdahulu secara logis tak ada perbedaan).
- 3) Penghalusan atau pengkhususan berlakunya undang-undang.
- 4) Penafsiran Teleologis/Sosiologis.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial. Sehubungan dengan ini ingin dikemukakan beberapa masalah yang dapat merupakan pendukung dan penghambat penegakan hukum yang rasional, serta tanggung jawab dan

⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.157.

⁸Blog Alexa Rank, di <http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. diakses, tanggal, 10 Februari 2022

⁹Yana Risdiana, *Penafsiran Kontrak Komersial antara Teks dan Konteks*, Inboeku Media Ilmu, Surabaya, 2016, hlm.21.

¹⁰Zhikrillah, *Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Riau Volume VI, Nomor 2 July -Desember 2019, hlm.4

¹¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.6.

bermanfaat yang harus ditanggulangi bersama. Adapun masalah yang bersangkutan adalah antara lain sebagai berikut:¹²

- 1) Pengertian penegakan hukum. Bagi para partisipan dalam usaha penegakan hukum harus jelas terlebih dahulu mengenai yang diartikan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengertian yang tidak tepat, dapat mengakibatkan pengambilan sikap dan penentuan tindak yang tidak tepat pula.
- 2) Penggairahan berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum. Masalah berpartisipasi ini berhubungan erat dengan masalah-masalah lain, seperti faktor-faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi yang berhubungan dengan unsur-unsur politis, ekonomis, sosial, budaya, dan religi yang dapat berpengaruh positif maupun negatif.
- 3) Pengembangan kemanusiaan antar para partisipan, subjek, dan objek pelaksanaan usaha penegakan hukum. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena merupakan masalah yang pelik dan peka dalam berpartisipasi dan pelaksanaan penegakan hukum. Masalah ini mutlak harus diperhitungkan untuk mencegah sikap dan tindak dalam usaha penegakan hukum yang tidak berprikemanusiaan dan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan,

¹²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuan Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.125-127.

dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya dan tebagainya).¹³

2. Yuridis adalah berdasarkan hukum ; secara hukum; menurut hukum.¹⁴
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.¹⁵
4. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.¹⁶
5. Online adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. bahwa online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁸ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai

¹³Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, Modern English Press*, Jakarta, 2002, hlm.1612.

¹⁴*Ibid*

¹⁵Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.3.

¹⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.56.

¹⁷Dedik Kurniawan, *Pengertian online*, PT Elext Media Kompetindo, Jakarta, 2014, hlm.2.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.

dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.²⁰ Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 366/PID.B/2020/PN.PBR.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*),²¹ yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

¹⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.133.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.25.

²¹Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004, hlm.2-3.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian Secara Yuridis

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “*Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan*”.²²

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²³

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hokum *Fockema Andrae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.²⁴ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²⁵

2. Pengertian Perjudian Secara Sosiologis

²²Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta :Balai Pustaka, 1995, hlm.419

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.367

²⁴Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm.186

²⁵M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm.179.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.²⁶ Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagisetiap perjudian.²⁷

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan

inkonvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.²⁸

3. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

²⁶Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid I, 1981, hlm.51

²⁷G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977, hlm.81

²⁸Kartini Kartono, *Op.cit*

4. Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.²⁹

Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh, ataupun KDRT.

5. Perjudian Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama islam, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang

²⁹Penjelasan umum UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

diselenggarakan dikasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.³⁰

6. Perjudian Menurut Hukum Islam

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.³¹

7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.³²

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

³⁰Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

³¹Zaini Dahlan, UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid. 1, 1995, hln.386

³²Kiswanto Dicaprio, *Tindak Pidana Perjudian*, anakdananaknaka.blogspot.com di akses tanggal 24 Maret 2022

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

B. Tinjauan Umum tentang Perjudian Online

1. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³³ Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

2. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang

berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam*

³³KBBI.web.id/judi.html, diakses 7 Maret 2022

tanggannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau

kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

4. Peraturan Mengenai Judi Online

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan Hakim

³⁴Ninieki Suparni, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.112

a. Pengertian Putusan Hakim

H.M.A. Kuffal menyatakan :

“Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.³⁵

Bertitik tolak pada isi rangkaian kata tersebut diatas dan sebagaimana beberapa kali disinggung dalam uraian terdahulu, terlihatlah hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Tidak berbeda dengan kita semua bahwa hakim adalah seorang manusia, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu telah benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang terakhir ini adalah sebagai konsekwensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁶

b. Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung

hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan. Atau menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa:³⁷ Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspreek*).³⁸ Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

2. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan

³⁵HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2007, hlm.429

³⁶Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Askara Persada Indonesia, 1987, hlm.34

³⁷M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 326

³⁸Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm 887

yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

3. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :
*“Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”*³⁹
4. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum Pengadilan Negeri dapat

menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum.

Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak dimuat dalam dakwaan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR

1. Kasus Posisi

Nama lengkap	: Fakhrol Rozi Bin Majelis Malin Sultan als Rozi
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 16 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Purnama Perum. Zaira Residence Blok A No. 8 Kel. Bencah Limbat Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh seseorang. Berawal ketika anggota pada hari Rabu sekitar pukul 16:30 sedang duduk-duduk meminum kopi sambil melakukan nomor pesanan perjudian jenis sie jie ke dalam situ website melalui handphone terdakwa di kedai

³⁹Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kopi LAUREN'S Jl. Cempaka Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung menunjukan surat perintah tugasnya, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nubia type M2 play warna hitam dengan no Gsm 0858059735831, (satu) unit handphone merk nokia tpe 3310 warna orange yang berisi sms pesanan nomor perjudian jenis sie jie dan kim, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri dengan no rek 4097662461173588, dan uang tunai sejumlah Rp.1.760.000_(satu juta tujuh ratus enam puluh rupiah).

Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan kim tersebut dengan cara menjual nomor perjudian sie jie dan kim kepada msyarakat yang ingin membeli nomor perjudian sie jie dan kim baik secara langung ataupun melalui sms ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa memasukan pesanan nomor perjudian sie jie dan kim tersebut ke alexis togel di website www.mainalexis.com dengan memasukan user name :nurebriza dan password: imaji16021980

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

DAKWAAN:

PRIMAIR :

1. Terdakwa Fakhrol Rozi Bin Majelis Malin Sultan als Rozi pada hari Rabu sekitar pukul 16:30 sedang duduk-duduk meminum kopi sambil melakukan nomor pesanan perjudian jenis sie jie ke dalam situ website melalui handphone terdakwa di kedai kopi LAUREN'S Jl. Cempaka Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung menunjukan surat perintah tugasnya, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

handphone merk nubia type M2 play warna hitam dengan no Gsm 0858059735831, (satu) unit handphone merk nokia tpe 3310 warna orange yang berisi sms pesanan nomor perjudian jenis sie jie dan kim, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri dengan no rek 4097662461173588, dan uang tunai sejumlah Rp.1.760.000_(satu juta tujuh ratus enam puluh rupiah).

2. Awalnya Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan kim tersebut dengan cara menjual nomor perjudian sie jie dan kim kepada msyarakat yang ingin membeli nomor perjudian sie jie dan kim baik secara langung ataupun melalui sms ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa memasukan pesanan nomor perjudian sie jie dan kim tersebut ke alexis togel di website www.mainalexis.com dengan memasukan user name :nurebriza dan password: imaji16021980

3. Terdakwa menyelenggarakan perjudian paling banyak senilai Rp. 2.000.000, _ (dua juta rupiah) dan paling sedikit senilai Rp. 1.000.000, _(satu juta rupiah) serta keuntungan yang diterima dalam penyelengaran perjudian sebesar 29% dari total hadiah untuk dua angka, sedangkan untuk hadiah 3 (tiga) angka tersangka memperoleh 59% serta untuk hadiah 4 (empat) angka tersangka memperoleh 66%, terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.400.000.000,_(empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,_(lima ratus ribu rupiah) pada setiap hari putaran judi sie jie dan judi jenis kim.

3. Keterangan Saksi

Saksi 1. HOKKY PUTRA UTAMA:

1. Saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
2. Pengakapan terhadap tersangka Fakhrol Rozi Bin Majelis Malin

Sultan als Rozi umur sekitar 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, adapun jenis perjudian yang diselenggarakannya adalah perjudian jenis sie jie (togel) dan perjudian KIM, dilakukan pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16:30 wib di kedai kopi lauren's jalan cempaka Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan kerja BRIPDA RIDHO WIRA TURNIP

3. Saksi menerangkan keterangan terdakwa Fakhrul Rozi Bin Majelis Malin Sultan als Rozi bahwa perjudian jenis sie jie (togel) diselenggarakan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu pukul 11:00 wib s/d pukul 16:30 wib dan sedangkan perjudian jenis KIM dilakukan setiap hari pukul 20:00 wib s/d 21:30 wib.
4. Keterangan Terdakwa

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan
2. Pada hari Rabu sekitar pukul 16:30 sedang duduk-duduk meminum kopi sambil melakukan nomor pesanan perjudian jenis sie jie ke dalam situ website melalui handphone terdakwa di kedai kopi LAUREN'S Jl. Cempaka Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung menunjukan surat perintah tugasnya, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nubia type M2 play warna hitam dengan no Gsm 0858059735831, (satu) unit handphone merk nokia tpe 3310

warna orange yang berisi sms pesanan nomor perjudian jenis sie jie dan kim, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri dengan no rek 4097662461173588, dan uang tunai sejumlah Rp.1.760.000_(satu juta tujuh ratus enam puluh rupiah).

3. Barang Bukti

1 (satu) unit handphone merk nubia type M2 play warna hitam dengan no Gsm 0858059735831, 1 (satu) unit handphone merk nokia tpe 3310 warna orange yang berisi sms pesanan nomor perjudian jenis sie jie dan kim, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri dengan No rek 4097662461173588 dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sejumlah Rp.1.760.000, (satu juta tujuh ratus enam puluh rupiah), dirampas untuk Negara, Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,_(tiga ribu rupiah)

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan Nomor : 366/PID. B/2020/PN. PBR

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang :

1. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;
2. Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harusla dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

3. Bahwa tujuan pemidanan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;
4. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dalam kasus ini hakim memutuskan terdakwa dengan pasal yang sama dengan pasal yang dituntut oleh JPU, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam persidangan, yakni pada hal yang memberatkan “perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat” Untuk itu penulis berfikir seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada si terdakwa, untuk dapat di mengerti bahwasanya tindak pidana perjudian ini sangat dilarang pada saat ini. Selain itu tindak pidana perjudian ini merupakan penyakit masyarakat yang harus di basmi hingga ke akar-akarnya, maka dari itu perlu diberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, agar dapat menimbulkan efek jera kepada siapapun yang melakukan dan akan melakukan tindak pidana perjudian online ini, ataupun tindak pidana perjudian pada umumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada tindak pidana perjudian *online* dalam perkara Nomor: 366/PID. B/2020/PN. PBR, dalam proses pembuktian didalam persidangan merupakan yang terpenuhi dalam unsur Perjudian *Online*, sesuai barang bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (3) UU

ITE. Maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pasal 27 (2) UU ITE

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan putusan Nomor: 366/PID. B/2020/PN. PBR tidak sesuai dengan asas *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikarenakan Hakim masih menggunakan Pasal 303 KUHP tentang Judi Konvensional padahal didalam hukum ada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti Undang-Undang Khusus (UU ITE) dapat mengesampingkan Undang-Undang Umum (KUHP). Maka dari itu hakim seharusnya menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus tentang *Judi Online*.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran yang dapat penulis berikan adalah seharusnya aparat penegak hukum lebih mengetahui jenis-jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang konvensional maupun tindak pidana yang lebih modern. Perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan tindak pidana perjudian yang konvensional, sedangkan tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU ITE merupakan perjudian yang dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berarti merupakan tindak pidana perjudian dimensi baru yang lebih modern.
2. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian online di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian online itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-undang

- No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pelaku tindak pidana perjudian online ini haruslah diterapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, penerapan sanksi yang berat ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2008. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta :Rineka Cipta
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Bhuan Ilmu Populer
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :PT. Rineka Cipta
- Butcher J.N, dan Carson K.C. *Abnormal Pshychology and Modern Life*. New York: Harper Collins Publisher
- Carson K.C dan Butcher J.N. 1992. *Abnormal Pshychology and Modern Life*”, New York : Harper Collins Publisher
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 1983. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an
- Didik J Rachbini. 2001. *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst*. Jakarta: Yayasan Obor
- Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom. 2015. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- G.W. Bawengan. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- HMA Kuffal. 2007. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: PT Tata Nusa
- Kartono Kartini. 2005. *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta :PT Raja Grafindo
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosia, Jidil l*. Jakarta: Rajawali
- Kurniawan Dedik. 2014. *Pengertian online*. Jakarta :PT Elext Media Kompetindo
- Lamintang. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sinar Baru
- Marzuki Peter Mahmud 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya

Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. 1983. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Tejemahan Saleh Adiwinata dkk) Jakarta: Bina Cipta

Moeljatno. 1985. *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyerta*. Jakarta: Bina Aksara

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Kamus

Christianata. 2018. *Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Teknologi Informasi. Universitas Palangka Raya.

Erdiansyah. 2010. *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1.

Erdianto Effendi. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Volume. 6 Nomor. 1.

Enik Isnaini. Vol.5 No.1 2018. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Independent.

Hetty Hassanah. Vol.8. No.2 2018. *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik*”, Majalah Ilmiah Unikom, Vol.8. No.2.

Ilkhamuddin Ramadhany Siregar. 2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/pid.b/2015 /PN/BNJ). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

D. Website

<http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159> diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<https://www.rupiah.me/bahaya-membuka-situs-judi-online/> diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-843514/judi-togel-marak-di-pekanbaru>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.